

# EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS E-GOVERNMENT DI DESA KERTASAYA KECAMATAN PANAWANGAN

Ihsan Nuralim<sup>1</sup>, Suci Navasari<sup>2</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, Indonesia<sup>2</sup>

E-mail: ihsannuralimq@mail.com

## ABSTRAK

*Intruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 mengharuskan seluruh pemerintahan Untuk menerapkan E-Government dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, tanggungjawab administrasi hingga menghilangkan budaya KKN. Sistem Informasi Desa diatur dalam Undang- Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang pembangunan desa dan sistem informasi pembangunan desa. Problem utama dalam menerapkan E-Government di d Desa Kertayasa adalah kapasitas sumber daya manusiadan infrastruktur. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana efektifitas sistem informasi desa berbasis E-Government di Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Sementara teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas sistem informasi Desa Kertayasa dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan insfrastruktur. Jika tidak ada Generasi agent of change dari Universitas Galuh, tata kelola website desa tidak akan efektif dan efisien. Peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Desa Kertayasa untuk melakukan kolaborasi dalam tata kelola website dengan berbagai Institusi yang ada di Kabupaten Ciamis, serta mendorong SDM Desa unruk mengikuti pelatihan khususnya di bidang IT.*

**Keywords:** Efektivitas, Sistem Informasi Desa, E-Government

## ABSTRACT

*Instruction of the President of the Republic of Indonesia No. 3 of 2003 requires all governments to implement E-Government with the aim of increasing effectiveness, efficiency, transparency, administrative responsibility to eliminate the KKN culture. Village Information Systems are regulated in Village Law No. 6 of 2014 concerning village development and village development information systems. The main problem in implementing E-Government in Kertayasa Village is the capacity of human resources and infrastructure. The purpose of this study was to examine the effectiveness of the E-Government-based village information system in Kertayasa Village, Panawangan District. The research method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. While data collection techniques are carried out through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the effectiveness of the Kertayasa Village information system is influenced by the capacity of human resources and infrastructure. If there is no Generation agent of change from Galuh University, village website management will not be effective and efficient. Researchers provide advice to the Kertayasa Village Government to collaborate in website management with various institutions in Ciamis Regency*

**Kata Kunci:** Effectiveness, Vilage Information System, E-Government

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, inovasi e-government telah diperkenalkan sejak tahun 2001 dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Teknologi Informasi), yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah harus menjadi yang pertama menggunakan teknologi telematika untuk mendukung tata pemerintahan yang baik dan memperkuat demokrasi langkah dalam penyelenggaraan administrasi elektronik serta terdapat Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, semakin menguatkan bahwa untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan suatu sistem kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (Astuti, Rahmadi, and Sandy 2022). Seiring dengan berjalannya waktu Indonesia terus berkembang mengikuti revolusi industri 5.0, sehingga Indonesia mampu mendapatkan peringkat *UN e-government development index* dengan peningkatan yang signifikan di beberapa tahun terakhir, sebagai berikut:

**Gambar 1. Peringkat e-government Indonesia**



Sumber: diolah dari beberapa sumber

Berdasarkan gambar.1 menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh peringkat yang sangat signifikan di setiap tahunnya. Tahun 2016 mendapat peringkat 116, tahun 2018 mendapat peringkat 107 hingga tahun 2020

Indonesia mendapat peringkat 88. Peningkatan peringkat yang diperoleh Indonesia menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menerapkan *e-government*. Hal ini juga berdampak positif bagi pemerintah salah satunya ialah upaya mengantisipasi perubahan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) untuk mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih berlaku.

*E-government* merupakan inovasi yang berasal dari proses penerapan pemerintah berbasis elektronik yang saat ini sudah banyak digunakan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan tanggung jawab administrasi. Untuk menjawab tantangan di era globalisasi saat ini, sebuah lembaga atau organisasi berupaya untuk meningkatkan nilai publik. Public value adalah tentang kemampuan *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang efisien dan fungsional. Pelayanan publik yang berkualitas memiliki kriteria seperti transparansi, daya tanggap dan fleksibilitas (Kinboh et al. n.d.).

Penerapan *e-government* dapat dikembangkan di tingkat pemerintahan pusat, desa dan daerah. Sejak diundangkannya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kekuatan besar untuk mendorong berbagai proyek pembangunan. Karena inti dari undang-undang tersebut bertujuan agar desa tidak hanya digunakan sebagai tanah bangunan, tetapi juga sebagai tanah bangunan sekaligus pembangunan desa dalam hal ini dapat mencakup empat bidang diantaranya penegakan hukum, pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa. Pembangunan desa dapat didukung oleh sistem informasi dan konsep e-government. Sistem informasi desa juga diatur dalam UU

Desa No. 6 Tahun 2014. Pembangunan Desa dan Sistem Informasi Pembangunan Desa disebutkan pada Pasal 86. Isi pasal tersebut meliputi hardware dan *software*, jaringan dan sumber daya manusia. Kemudian, isi SID meliputi informasi desa, informasi pembangunan desa, kawasan perdesaan, dan informasi lainnya yang terkait dengan pembangunan desa dan perdesaan (Putri, Kurniansyah, and Priyanti 2021). Kebijakan ini menuntut semua desa mampu menerapkan *e-government*.

Perkembangan teknologi dan internet membuat website menjadi suatu kebutuhan untuk mendapatkan informasi dengan cepat, tepat dan akurat. Tanggung jawab pemerintah untuk merealisasikan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dicapai jika pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang lebih *responsif* dan *fleksibel*. Menyadari manfaat dari teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka perlu diterapkan sistem baru di Desa Kertayasa, untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengaksesan informasi di Desa Kertayasa yang masih menggunakan cara sistem manual. Maka, diakhir tahun 2022 Desa Kertayasa resmi memiliki website desa yang dapat diakses melalui laman berikut <http://kecamatan-panawangan.ciamiskab.go.id/kertayasa/index.php/peta>.

Website Desa Kertayasa akan memberikan nilai manfaat kepada dua aktor yaitu masyarakat dan pemerintah desa. Didalam website resmi Desa Kertayanya terdapat berbagai infrastruktur yang dapat dikelola. Permasalahan yang dihadapi Desa Kertaya dalam pengelolaan website ini adalah sumber daya manusia. Desa Kertayasa sangat minim memiliki sumber daya manusia yang memiliki kapasitas di bidang teknologi. Hal ini akan menjadi ancaman bagi Desa Kertayasa terkait *up to datenya* sebuah informasi yang ada didalam website resminya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penelitian ini ingin

mengkaji mengenai bagaimana efektivitas sistem informasi desa berbasis e-government di Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan.

## KAJIAN PUSTAKA

### Efektivitas

Efektivitas atau efisiensi merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran tercapai dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya. Upaya untuk mengevaluasi fungsi organisasi dapat dilakukan melalui konsep efisiensi. Konsep ini merupakan salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan yang signifikan dalam bentuk dan manajemen organisasi dan secara efektif menggunakan sumber daya yang tersedia dalam hal input, proses dan output. Mengukur keefektifan program aksi tidaklah mudah, karena keefektifan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan bergantung pada siapa yang menilai dan menafsirkannya.

Efektivitas program, dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. (Budiani, 2007) mengatakan untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut ini:

1. Ketepatan Sasaran Program, Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program, Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.

3. Tujuan Program, Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah (Astuti, Rahmadi, and Sandy 2022).

### Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sistem internal organisasi yang memenuhi kebutuhan yang berurusan dengan acara sehari-hari, mendukung operasi, manajemen dan operasi strategis organisasi dan memberikan informasi yang diperlukan. Adapun defisi secara lain, sistem informasi adalah sistem internal organisasi yang menyeimbangkan kebutuhan pemrosesan transaksi harian dan mendukung kegiatan manajemen operasional organisasi dengan kegiatan strategis organisasi sehingga pihak eksternal tertentu dapat diberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (Kinboh et al. n.d.).

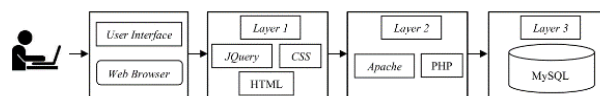
### Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa (SDI) merupakan seperangkat program dan metode untuk menggunakan data informasi untuk mendukung manajemen sumber daya tingkat desa berbasis masyarakat yang diciptakan oleh CRI sejak tahun 2009 untuk menciptakan ruang bagi masyarakat dan perangkat desa untuk berpartisipasi secara demokratis dalam pembangunan desa. SID memiliki peran penting yaitu mendukung proses pelayanan administrasi yang harus dikelola, dikendalikan dan dipelihara. Penerapan SID berbasis IT di kantor desa membutuhkan manajemen risiko yang dapat mengantisipasi ancaman dan hambatan serta mampu mengembangkan sistem dengan menggunakan sumber daya yang tersedia (Arifin and Setyadi 2022).

Arsitektur dari Web dan SID, Arsitektur dimulai dari user dengan memasukkan alamat http, selanjutnya akan masuk pada layer interface. Pada layer interface ini terdapat ketika user masuk ke web browser. Setelah itu masuk pada layer 1, dimana pada layer ini terdapat bahasa pemrograman untuk memperbaiki tampilan web yaitu JQuery,

HTML, dan CSS. Sementara untuk inti atau pada layer 2 dalam Web dan SID dibuat dengan menggunakan bahasa PHP dengan menggunakan Apache sebagai server. Layer ke 3 atau bagian database akan digunakan MySQL (Mahpud, Lestari, and Others 2022). Dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2. Arsitektur Sistem Informasi Desa**



Setelah melalui proses perancangan dan koding, maka didapatkanlah hasil yaitu sistem informasi berbasis web pada Desa Kertayasa yang dapat diakses melalui laman <http://kecamatan-panawangan.ciamiskab.go.id/kertayasa/index.php/peta>.

### E-Government

Menurut Richardus E. Indrajit, e-government adalah penggunaan ICT (*information, communication, technology*) untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak lain. Bank Dunia mendefinisikan *e-governance* sebagai upaya untuk menyebarkan dan menggunakan telematika untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan efektivitas biaya, memberikan berbagai layanan kepada masyarakat dengan lebih baik, memungkinkan publik mengakses informasi secara lebih luas dan membuat administrasi lebih akuntabel. (bertanggung jawab) dan terbuka untuk umum.

*E-government* merupakan program pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik serta melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis, melalui pengembangan e-government, pemerintah mengharapkan dapat dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja

dilingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. *E-government* dapat diartikan secara beragam karena pada dasarnya *e-government* dapat menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk dan ruang lingkup.

Berdasarkan hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government*, untuk menerapkan konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

1. *Support*, yang mendukung dalam pengembangan *e-government*, antara lain:
  - a. *Political Will*, sejauhmana dukungan Pemerintah Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan dalam kemauan pemerintah Desa Kertayasa dalam mengembangkan *e-government*
  - b. *Continuitas*, keberlanjutan penerapan *e-government* di Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan yang mencakup perencanaan *e-government* di Desa Kertayasa kedepannya.
  - c. *Sosialisasi*, mengetahui bagaimana pemerintah dalam mensosialisasikan pengembangan *e-government* tersebut.
2. *Capacity*, merupakan kemampuan pemerintah dalam mewujudkan *e-government*, antara lain:
  - a. Sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam mengelola dan mengakses teknologi informasi agar penerapan *e-government* sesuai yang diharapkan.
  - b. Sumber daya finansial, untuk mengetahui anggaran yang ditetapkan dan pengalokasian dana dalam pengembangan *e-government*.
  - c. *Infrastruktur*, melihat bagaimana ketersediaan infrastruktur teknologi.
3. *Value*, keuntungan manfaat yang diperoleh dengan adanya pengembangan *e-government* tersebut, khususnya manfaat yang akan diperoleh masyarakat dengan

adanya *e-government* (Kadek Wiwin Dwi Wismayanti 2022).

### **Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh 10 instansi pemerintah di pusat, didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan tersebut, dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/ atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu:

1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah.
2. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan.
3. Kepuasan yang diberikan dan/ atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan) (Kadek Wiwin Dwi Wismayanti 2022).

### **Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Kebijakan dan Strategi Nasional *e-Government* Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 mengharuskan pemerintah untuk segera melakukan peralihan ke *e-government*. Perubahan ini memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan kemajuan

teknologi informasi untuk menghilangkan hambatan organisasi birokrasi, membangun jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan lembaga pemerintah bekerja secara terintegrasi untuk meningkatkan akses informasi dan masyarakat untuk menyederhanakan layanan pemerintah. Dengan demikian, seluruh masyarakat, lembaga pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan menerapkan *e-government* (Kadek Wiwin Dwi Wismayanti 2022).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2017:8) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian dilaksanakan di Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah perangkat desa Kertayasa dan beberapa masyarakat sebagai penerima layanan yang ada disekitar kantor Desa Kertayasa. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan berupa hasil dari wawancara dan observasi serta data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang dalam menganalisis masalah penelitian. Data sekunder dapat berupa literatur, dokumen, laporan dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan model pendekatan Miles and Huberman. Model Miles and Huberman dalam meliputi reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan (Nugroho, Akbar, and Hutabarat 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Website Resmi Desa Kertayasa**

Tahun 2022, Desa Kertayasa resmi memiliki website desa. Desa kertayasa dalam mendapatkan website resmi harus melakukan prosedur yang harus di ajukan kepada dinas komunikasi dan informatika kabupaten ciamis diantaranya:

1. Membuat surat permohonan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
2. Membuat surat kuasa dari kepala desa atau sekretaris desa kepada perangkat desa sebagai pengelola domain desa.
3. Membuat SK pengangkatan perangkat desa pengelola website desa.
4. Melampirkan SK pengangkatan kepala desa terkait.

Terdapat berkas administrasi Persyaratan yang harus di penuhi sebelum pengajuan ke dinas komunikasi dan informatika RI melalui Dikominfo kabupaten, diantara berkas tersebut ada SK Pengangkatan kepala desa beserta *potocopy* kepala desa dan operator, serta melampirkan surat kuasa untuk perangkat desa yang mengelola website desa, dan surat kuasa dari kepala desa untuk operator pengelola website. Setelah selesai semua administrasi lengkap di ajukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis untuk di di ajukan ke Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Setelah kurang dari 1 minggu pihak Diskominfo memberikan link <http://kecamatanpanawangan.ciamiskab.go.id/kertayasa/index.php/> dan pembekalan serta konsultasi untuk mengisi website desa tersebut.

Website resmi Desa Kertayasa yang sudah memiliki SK pengelola website desa Nomor : 141/77Ds-2022. Dengan adanya SK ini desa memiliki hak kuasa untuk mengelola sepenuhnya Website desa dengan kebutuhan desa.

## Infrastruktur Website Resmi Desa Kertayasa

Website resmi Desa Kertayasa tidak mampu berdiri sendiri melainkan website tersebut harus memiliki infrastruktur yang berbentuk bigdata informasi diantaranya yaitu profil desa, pemerintahan desa, data desa, regulasi, dan peta. Adanya infrastruktur tersebut mempermudah masyarakat dalam mendapatkan segala informasi yang terkait dengan Desa Kertayasa.

### Gambar 3. Dashboard Website Resmi Desa Kertayasa



Sumber: <http://kecamatanpanawangan.ciamiskab.go.id/kertayasa/index.php/>

Berdasarkan gambar.3 menunjukkan bahwa dalam website terdapat tujuh infrastruktur diantaranya yaitu beranda, beranda berisikan terkait berbagai macam berita yang ada di Desa Kertayasa. Profil desa, dalam profil desa terdapat dua bagian yaitu profil wilayah desa dan sejarah desa. Pemerintahan desa, pemerintahan desa terbagi menjadi dua yaitu visi dan misi desa serta pemerintahan desa. Data desa, terdapat tujuh bagian didalamnya diantaranya data wilayah administratif, data pendidikan dalam kartu keluarga (KK), data pendidikan yang ditempuh, data pekerjaan, data agama, data jenis kelamin, dan data warga negara. Didalam data desa bentuk data yang ditampilkan berbentuk grafik angka. Selanjutnya regulasi, terdapat dua bagian diantaranya produk hukum dan informasi publik. Lalu peta, dimana didalamnya terdapat peta yang menunjukkan Desa Kertayasa. Yang terakhir adalah login,

dimana infrastruktur ini digunakan oleh aparat desa dalam memasukan data-data yang ada didalam website resmi.

Infrastruktur website resmi Desa Kertayasa bisa dikatakan sudah memenuhi standarisasi website desa. Hal ini dibuktikan dengan website resmi Desa Kertayasa memiliki layanan informatif kepada masyarakat. Meskipun seharusnya website pemerintah yang baik seharusnya memenuhi tiga indikator diantaranya:

1. Informatif: website berisi informasi umum saja seperti bagan struktur, profil, berita, data penduduk, peta dan lain sebagainya.
2. Interaktif: ruang komunikasi seperti ada kolom komentar, no wa, email dan sejenisnya. Yang mana bagian tersebut mampu merespon masyarakat dengan cepat.
3. Transaktif: dalam website terdapat tempat pembayararan pajak dan pembayaran lainnya. Yang mana bisa pembayaran bisa menggunakan *e-money* (dana, tranfer, parkir, dll).

### Tata Kelola Website Resmi Desa Kertayasa

Website resmi Desa Kertayasa dikelola oleh aparat desa di bidang kaur perencanaan dengan SK kepala desa kertayasa untuk mengelola website Nomor: 141/77Ds/2022 yang ada di pemerintahan Desa Kertayasa. Website akan terkelola dengan efektif dan efisien jika pengelolanya memiliki keahlian dibidang teknologi. Akan tetapi Desa Kertayasa tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kapasitas terkait dengan teknologi.

Pemerintah Desa Kertayasa saat ini terdapat 8 aparat desa termasuk didalamnya Kepala Desa, 4 kepala dusun, dan 7 anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dari keseluruhan perangkat desa yang ada di Desa Kertayasa memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan jabatannya. Perangkat desa tersebut dipilih dan diberikan jabatan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam kemampuan yang dimiliki para perangkat desa tentu saja ada sebuah kelebihan dan



kekurangan, hal tersebut bisa dilihat dari tugas yang dijalankannya. Dikarenakan wilayah pemerintah Desa Kertayasa berada di atas ketinggian perbukitan atau bisa dikatakan cukup jauh dari keramaian dan pusat kota, salah satu kekurangan yang dimiliki pemerintah Desa Kertayasa termasuk kapasitas aparatur desa yang berada di bidang teknologi, hal tersebut disebabkan karena faktor jaringan yang menghambat pertumbuhan kemampuan aparatur desa di wilayah pemerintah Desa Kertayasa.

Pemikiran memimpin dengan cara kuno (*politik will*) akan sangat menghambat pengelolaan website. Apalagi dengan adanya website yang masih baru diterima oleh Desa Kertayasa. Terdapat banyak ancaman dan tantangan-tanggungan yang akan dihadapi oleh pemerintah desa salah satunya ialah tata kelola website.

Website Desa dikelola untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Meskipun website desa ini baru launching di akhir tahun 2022 akan tetapi dalam pengelolaan website desa sudah dikatakan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan sudah terdapat data di dalam 7 infrastruktur.

Pemerintahan desa Kertayasa tidak serta merta membuat, mengelola dan menginput data dengan mandiri. Akan tetapi pemerintahan desa dibantu generasi agent of change dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh melalui Program KKN Tematik Bacth II.

Kepala Desa Kertayasa menuturkan: "Peran Generasi *Agent Of Change* dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan dari Universitas Galuh dengan Program KKN-T sangat membantu perubahan dan pengembangan E-Government di Desa Kertayasa, salah satu bentuk yang diwujudkanannya oleh mahasiswa Peserta KKN-T adalah menjadikan desa memiliki *website* resmi".

Pemerintah Desa Kertayasa diharapkan mampu melakukan *up to date* data hingga terintegrasinya data dan mengsosialisasikan

website desa, sehingga mampu menjadi pemerintahan yang *Good Government*.

## KESIMPULAN

Desa harus mampu mengikuti perkembangan revolusi industri jika pemerintahan desa menerapkan *E-Government* dalam masa kepemimpinannya. Desa Kertayasa mampu mewujudkan E-gov pada ahir tahun 2022 salah satu wujudnya adalah desa sudah memiliki website desa yang memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Akan tetapi pemerintah desa kertayasa memiliki tantangan berupa kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur sehingga peran dari pemerintahan desa harus lebih kuat untuk mewujudkan Intruksi Presiden RI NO 3 Tahun 2003 tentang mengharuskan pemerintah untuk segera melakukan peralihan ke *E-Government*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, F, And R Setyadi. 2022. "*Penerapan Cobit Pada Analisis Manajemen Risiko Pada Sistem Informasi Desa.*" *Jurikom (Jurnal Riset ...* 9(3): 733–39. [Http://Www.Ejurnal.Stmik-Budidarma.Ac.Id/Index.Php/Jurikom/Article/View/4315](http://www.ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom/article/view/4315).
- Astuti, Veronica Sri, Andhi Nur Rahmadi, And Dinda Sandy. 2022. "*Efektivitas E-Government Siap Pemkot Probolinggo Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Wonoasih.*" *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 1(12): 1585–90.
- Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Putu Eka Purnamaningsih. 2022. "*Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Masa Era New Normal Pada Pemerintah Daerah Bandung.*" 16(10): 7507–18.
- Kinboh, Margareta Tania Et Al. "*Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Pada Kantor Desa Kampet Berbasis Web.*" : 1–12.



- Mahpud, Mahpud, Suci Berliany Lestari, And Others. 2022. "Perancangan Sistem Informasi Kas Masjid Menggunakan Metode Waterfall." *Simposium Nasional Multidisiplin (Sinamu)* 9(2): 274–80.
- Nugroho, Ngajudin, Fauzi Akbar, And Maulana Hutabarat. 2019. "Analisis Komunikasi Di PT. Asuransi Buana Independent Medan." 3(1).
- Putri, Amelia, Dadan Kurniansyah, and Evi Priyanti. 2021. "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Website Opensid Open-Side Website-Based Public Service Innovation." *Jurnal Manajemen* No.13(Vol.4): 1–9.